

# PERENCANAAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

## KOTA DUMAI TAHUN 2018

Oleh : Sasa Fitarda

Email : Safitarda1301@gmail.com

**Pembimbing : Baskoro Wicaksono, S.IP, M.IP**  
Jurusan Ilmu Pemerintahan-Prodi.Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya JL. H.R Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28294

Telp/Fax: 0761-63277

### ABSTRAK

Planning is an important key to starting a program. When Planning, choices are made, steps are arranged to guide so that the will can be grasped at the time that has been outlined such as the preparation of the local government work plan. Planning is defined as the process of setting goals and determining the choice of actions taken, and deciding steps to achieve goals. A plan is a statement that is needed and must be executed so that the goal is reached. The formulation of the problem in this research is how the preparation of the Dumai city regional government work plan what are the factors that cause the dynamics in the preparation of the Dumai city regional government work plan. The purpose of this study is to describe the preparation of the Dumai city regional government work plan and describe the factors that cause in the preparation of the Dumai city regional government work plan. The research method used is a qualitative method with a descriptive approach. Using data collection techniques from interviews, observations, and RKPD documents in Dumai city.

**Keywords** : Planning, Local Government Work Plan, Bureaucratic.

#### A. PENDAHULUAN

Perencanaan adalah kunci penting untuk memulai sebuah program. Pada saat perencanaan, pilihan-pilihan dibuat, langkah-langkah disusun untuk memandu agar kehendak bisa digenggam pada waktu yang telah digariskan seperti penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perencanaan didefinisikan sebagai proses penetapan tujuan dan penetapan pilihan tindakan yang dilakukan, serta memutuskan langkah untuk mencapai tujuan. Tujuan dalam hal ini adalah hasil yang diharapkan.

Perencanaan pembangunan daerah seharusnya mencerminkan kebutuhan realitas suatu daerah, sebagaimana dinyatakan Kuncoro (2012,h.3) ,bahwa perencanaan

pembangunan daerah tidak hanya perencanaan dari suatu daerah, tetapi perencanaan untuk suatu daerah. Perencanaan pembangunan daerah berfungsi sebagai perencanaan untuk memperbaiki penggunaan sumber daya-sumber daya publik yang tersedia di daerah tersebut. Sehingga menjadi penting dalam proses penyusunannya harus bersifat aspiratif dan menggunakan pendekatan perencanaan yang tepat.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah harus dilakukan setiap tahun agar dapat disesuaikan dengan perkembangan kondisi usulan. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, termasuk pemerintahan daerah, wajib membuat perencanaan yang menjadi bagian siklus atau mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Namun, di dalam penyusunan rencana masih terjadinya ego sektoral organisasi perangkat daerah dan belum optimalnya pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang tidak diakomodir oleh organisasi perangkat daerah.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah kota Dumai?
2. Apa saja faktor yang menyebabkan dinamika dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mendeskripsikan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah kota Dumai.
- b. Untuk mendeskripsikan faktor yang menyebabkan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah kota Dumai.

## **D. KERANGKA TEORI**

### **1. Perencanaan Daerah**

Berdasarkan aktor yang melakukan proses penyusunan perencanaan pembangunan, Innes (2000) membedakannya dalam beberapa model, yaitu:

1. *Technical Bureauacratic Planning*. Perencanaan ini berbasis kepada penilaian birokrasi atas alternatif yang terbaik untuk mencapai tujuan dengan mengembangkan analisis komparatif serta proyeksi, untuk membuat suatu rekomendasi bagi pengambil keputusan berdasarkan informasi dan penilaian atas dampak politik dan perubahan yang dikehendaki.
2. *Political Influence Planning*. Dalam model ini, perencana adalah elit pimpinan atau anggota legislatif yang terpilih. Perencanaan berbasis pada aspirasi/harapan dari masing-masing konstituennya.

3. *Social Movement Planning*. Perencanaan disusun berdasarkan pergerakan masyarakat dimana di dalamnya terdapat individu atau kelompok yang secara strktur tidak mempunyai kekuatan, bergabung bersama dengan tujuan yang sama.
4. *Collaborative Planning*. Dalam model ini setiap partisipan bergabung untuk mengembangkan misi dan tujuannya, menyapaikan kepentingannya untuk diketahui bersama, mengembangkan saling pengertian atas masalah dan perjanjian yang mereka butuhkan, dan kemudian bekerja melalui serangkaian tugas yang diperjanjikan bersama untuk mencapai kesejahteraan bersama.
5. Lebih lanjut Solihin (2008 hl. 193) menjelaskan bahwa syarat perencanaan harus meliputi beberapa aspek di antaranya: (a) faktual dan realistis, yang mengacu kepada dinamika yang ada, (b) logis dan rasional, yaitu perencanaan yang masuk akal dan dapat dimengerti, (c) fleksibel, yaitu rencana yang luwes dengan memerhatikan kendala dan limitasi lingkungan sosial maupun fisik, (d) objektif, yaitu memenuhi komitmen terhadap kepentingan umum, dan (e) komprehensif atau menyeluruh.

Persyaratan untuk terjaminnya pelaksanaan rencana salah satunya adalah perencanaan harus berorientasi pada pelaksanaan yaitu untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang beorientasi pada pelaksanaan, maka hal pertama yang perlu diusahakan antara lain adalah perlunya dukungan elite politik yang terdapat di daerah bersangkutan. Elite politik tersebut meliputi pimpinan daerah, pimpinan dinas dan instansi, serta anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Alasannya jelas karena para elite politik inilah yang mengambil keputusan tentang program dan kegiatan pembangunan pada daerah. Dengan demikian, bila para elite politik ini mempunyai komitmen yang kuat, maka pelaksanaan perencanaan pembangunan akan dapat terjamin dan demikian pula sebaliknya bilamana komitmen elite politik tersebut sangat rendah atau tidak sama sekali.

### E. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Di dalam penelitian ini dilakukan di Badan Perencanaan dan Pembangunan kota Dumai.

### F. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2018

Rencana tahunan daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun. Penyusunan RKPD melalui urutan kegiatan sebagai berikut:

#### 1. Persiapan Penyusunan RKPD

Dalam tahap persiapan penyusunan RKPD ini Bappeda kota Dumai mulai menyusun rencana kerja tim penyusunan RKPD dengan melakukan data-data dan informasi-informasi terkait dengan perencanaan pembangunan daerah di kota Dumai. Tahapan penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan.

#### 2. Perumusan Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD yang disusun dan dikoordinasi oleh bappeda kepada para kepala OPD serta pemangku kepentingan dan dikonsultasikan dengan publik. Konsultasi

berguna untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan rancangan awal.

Selanjutnya, hasil dari konsultasi publik tersebut oleh Bappeda dijadikan bahan untuk menyempurnakan rancangan awal RKPD, yang selanjutnya akan disampaikan kepada kepala daerah dan menjadi pedoman awal bagi perangkat daerah untuk menyusun rancangan awal renja masing-masing perangkat daerah. Penyusunan rancangan rencana kerja oleh perangkat daerah dengan mengacu pada rancangan rencana pembangunan yang mengacu pada prioritas daerah.

**Tabel 3.1 Matrik Prioritas Pembangunan, Program Prioritas Daerah tahun 2018**

Prioritas Daerah	Program
1) Pengembangan Dan Pamarataan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan	1. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 2. Program Peningkatan Dukungan Pendidikan Mahasiswa 3. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
2) Pengembangan Jaringan Pelayanan Air Bersih dan Infrastruktur Dasar masyarakat	1. Program Perencanaan Tata Ruang 2. Program Pemanfaatan Ruang 3. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 4. Program

	<p>Pembangunan Jalan dan Jembatan</p> <p>5. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong</p> <p>6. Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan</p> <p>7. Program Perencanaan Tata Ruang</p>
	<p>8. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya</p> <p>9. Program Pengembangan Perumahan</p> <p>10. Program Lingkungan Sehat Perumahan</p> <p>11. Program penyediaan dan pengolahan air baku</p> <p>12. Program pengelolaan areal pemakaman</p>
3) Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

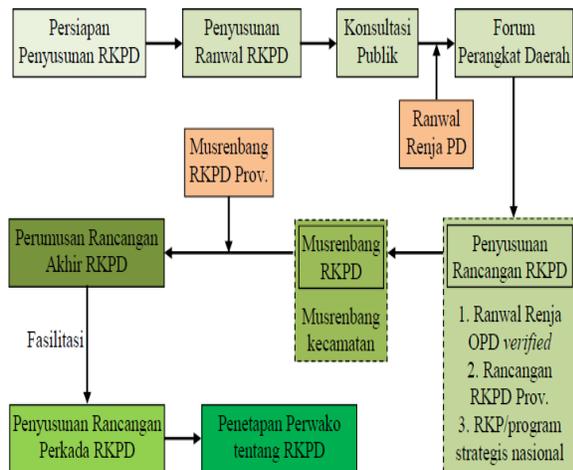
Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik Yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif Dan Transparan	
4) Pengembangan Jaringan Pelayanan Air Bersih Dan Infrastruktur Dasar Masyarakat	<p>1. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan</p> <p>2. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar</p>
5) Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik Yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan	<p>1. Program Pengembangan data/informasi</p> <p>2. Program Kerjasama Pembangunan</p> <p>3. Program perencanaan pembangunan ekonomi</p> <p>4. Program perencanaan pembangunan daerah</p> <p>5. Program perencanaan sosial budaya</p> <p>6. Penyelenggaraan musrenbang RKPD</p>

6) Pengembangan Jaringan Pelayanan Air Bersih dan Infrastruktur Dasar Masyarakat	1. Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 2. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
--	---

Sumber: Dokumen RKPD

### 3. Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Pelaksanaan musrenbang mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan hingga tingkat kota. Musrenbang tersebut dimaksudkan untuk membahas rancangan awal RKPD yang telah disusun dengan bahasan diantaranya menyepakati permasalahan pembangunan daerah, menyepakati prioritas pembangunan daerah, menyepakati program, kegiatan, pagu **Dinamika Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah**



Sumber: Permendagri No.86 Tahun 2017, diolah.

Berdasarkan bagan diatas bahwa penyusunan dokumen RKPD dilakukan melalui tahapan yang sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan.

Diagram Alur penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai:

indikatif, indikator dan target kinerja, penyelerasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan.

### 4. Rancangan Akhir RKPD

Rancangan akhir RKPD dituangkan dalam rancangan peraturan kepala daerah tentang RKPD. Penetapan rencana rancangan akhir RKPD menjadi produk hukum atau landasan hukum rencana pembangunan sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Rencana pembangunan tahunan daerah ditetapkan sebagai peraturan kepala daerah Peraturan Walikota Dumai Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2019.

**Gambar 3.2 Diagram Alur Penyusunan RKPD**

### 1. Penyusunan Rancangan Awal RKPD

Perumusan rancangan awal RKPD merupakan awal dari seluruh proses penyusunan rancangan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh SKPD provinsi dan kabupaten/kota menyusun rancangan Renja SKPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana yang dimaksud pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 74 mencakup salah satunya adalah :

- Penelaahan terhadap sasaran dan arah kebijakan RPJMD

Sasaran dan arah kebijakan RPJMD merupakan prioritas pembangunan daerah yang dijabarkan kedalam kebijakan tahunan yang harus dipedomani dalam menentukan prioritas pembangunan RKPD, dirumuskan secara teknokratik dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis daerah.

b. Perumusan permasalahan pembangunan daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan atau standar yang ditetapkan serta antara apa yang ingin dicapai masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Permasalahan pembangunan menjadi salah satu dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah dan perangkat daerah yang digunakan dalam perumusan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dinamika dalam permasalahan pembangunan kota Dumai adalah banyaknya masalah pembangunan yang belum terselesaikan karena keterbatasan anggaran kota, maka dalam menghadapi dinamika perlu membangun komunikasi dan perlunya dukungan dari semua pihak yang terlibat dalam pembangunan daerah kota Dumai guna mewujudkan sesuai yang direncanakan.

c. Perumusan rencana kerja dan program pendanaan

Rencana kerja dan pendanaan daerah kota Dumai Tahun 2018 yang dituangkan dalam ini merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi program dan kegiatan. Untuk mendukung prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kota Dumai Tahun 2018 yang tertuang pada RKPD Kota Dumai Tahun 2018.

d. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD

Faktor yang menyebabkan dinamika dalam penelaahan pokok-pokok pikiran ini adalah anggaran dan juga dengan penyesuaian rencana kerja organisasi perangkat daerah, karena keterbatasan anggaran maka belum bisa optimal dalam mengakomodir usulan DPRD yang akan diakomodir oleh organisasi perangkat daerah. Pokok-Pokok Pikiran DPRD itu sendiri merupakan salah satu

bahan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan bersifat politis. Kualitas suatu penyusunan dokumen RKPD itu sendiri dikota Dumai dipengaruhi oleh sejauhmana kematangan dalam tahap persiapan, rancangan awal dan sampai pada tahap rancangan RKPD itu sendiri.

2. Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan

Musrenbang sebagai sarana untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dengan berbagai indikator seperti pemenuhan kebutuhan pokok untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat kota Dumai. Namun faktor yang menyebabkan dinamika dalam musrenbang tidak semua hasil musrenbang dari tingkat kelurahan,kecamatan, hingga tingkat kota bisa tertampung disebabkan dengan memperhatikan skala prioritas pembangunan daerah, serta keterbatasan dana, dan juga memperhatikan untuk memenuhi visi misi walikota, renja maupun renstra organisasi perangkat daerah, serta penelaahan dari wakil masyarakat.

3. Konsultasi Publik

Forum konsultasi publik dilaksanakan oleh Bappeda yang diikuti oleh pemangku kepentingan pembangunan untuk menghimpun aspirasi atau harapan masyarakat terhadap tujuan, sasaran, dan program pembangunan daerah. Faktor yang menyebabkan dinamika dalam konsultasi publik ini dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan isu permasalahan dan dalam membahas permasalahan yang ada di setiap kecamatan yang disampaikan oleh setiap perwakilan kecamatan, sehingga menyebabkan terjadi dinamika dalam pembahasan usulan yang diusulkan setiap perwakilan kecamatan. Dalam konsultasi publik seharusnya usulan masyarakat setiap perwakilannya dapat diterima oleh setiap perangkat daerah, karena masukan dan saran ini menjadi

penyempurnaan rancangan awal RKPD itu sendiri. Sehingga, melalui forum konsultasi publik ini, rancangan awal RKPD ini dapat mengakomodir berbagai aspirasi masyarakat.

#### 4. Forum Perangkat Daerah

Forum perangkat daerah ini adalah bagian dari penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah, melalui forum ini aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan disampaikan guna menyempurnakan rancangan kebijakan penyusunan dalam perencanaan.

Forum OPD ini merupakan salah satu proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah kota Dumai yang memberikan kewenangan kepada perangkat daerah dalam menentukan bentuk dan jenis penyelenggaraan tupoksi berdasarkan kebutuhan partisipasi masyarakat dan aspirasi pemangku kepentingan lain.

### G. KESIMPULAN

Penyusunan RKPD ada beberapa 4 urutan kegiatan yang pertama adalah persiapan penyusunan RKPD, yang kedua adalah perumusan rancangan awal RKPD, yang ketiga adalah Pelaksanaan musrenbang, dan yang keempat adalah Rancangan akhir RKPD dituangkan dalam rancangan peraturan kepala daerah tentang RKPD.

Dinamika yang terjadi dalam penyusunan RKPD dalam hal penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, bahwa gagasan DPRD yang sedikit di akomodir oleh organisasi perangkat daerah. Dinamika yang terjadi dalam Forum konsultasi publik ini dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat sesuai dengan masalah-masalah yang dihadapi, tetapi masih ada ego sektoral dalam organisasi perangkat daerah dalam penyusunan RKPD sesuai dengan isu permasalahan kota Dumai.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Dadang Suwanda. *Optimalisasi Fungsi Penganggaran DPRD dalam Penyusunan Perda APBD*, 2016 . PT. Remaja Rosdakarya: Bandung.

Hasyimzoem Yusnani. *Hukum Pemerintahan Daerah*, 2017. Rajawali Pers: Jakarta

John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, 2012. Pustaka Belajar: Yogyakarta

Nurman. *Strategi Pembangunan Daerah*, 2015. Rajawali Pers: Jakarta

Putra Windhu, *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*, 2018. Rajawali Pers: Jakarta

Rulam Ahmadi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 2016 . Ar-Ruzz Media: Yogyakarta

Rahardjo Adisasmita, *Manajemen Pemerintah Daerah*, 2011. Graha Ilmu: Yogyakarta

Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*, 2015. Rajawali Pers: Jakarta

Wasistiono Sadu, Wiyoso Yonatan. *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)*, 2009. Fokus Media: Bandung

Widodo Sigit Pudjianto. *Pendekatan Baru Perencanaan Pembangunan Daerah*, 2019. Kompas: Jakarta.

### Artikel Ilmiah

Novy Setia Yunas. 2017. Efektivitas E-Musrenbang di Kota Surabaya dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Berparadigma Masyarakat. Universitas Darul Ulum

Eddy Purnama. 2013. Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota di

Aceh. Universitas Syiah Kuala

Agus Triono. Vol.7: Edisi 1 Januari- Juni 2020. Dinamika Penyusunan Rencana Jangka Menengah Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018-2023. Universitas Riau

Azura Handayana Putri. Vol.3 No 1- Februari 2016. Dinamika Pembahasan dan Pengesahan RPJMD Provinsi Riau 2014-2019. Universitas Riau

Agus Sugiarto. Vol. 4 No. 1 February 2017. Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Anggaran Daerah (Studi Kasus Pada Proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah, dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Bidang Fisik dan Prasarana Tahun Anggaran 2013-2015 di Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Duriati Asmawati. Perwakilan dan Pembuatan Keputusan Politik Anggota DPRD Kabupaten Pasuru dalam Pembangunan Infrastruktur Wilayah Timur Kabupaten Pasuruan. Vol. , No.1 Januari-Maret 2017.

### **Peraturan perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah , Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tetang RPJP Daerah dan RPJM Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan RKPD.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Peraturan Walikota Dumai Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Penggunaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Peraturan Walikota Dumai Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2019.